PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022


**KECAMATAN MANTUP**

**KABUPATEN LAMONGAN**

**Jl. Ayam Alas No. 45 Mantup**

**E-mail: Mantup@lamongankab.go.id**

**Website: www.lamongankab.go.id**

KODE POS: 62283

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan fahun 2022 ini sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi. misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan PD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang

Kami mengucapkan terimakasih kepada segenap Pegawai di lingkungan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang telah bekerjasama dan berperan aktif, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mantup tahun 2022 dapat tersusun dengan baik.

Mantup, 5 Agustus 2022

**CAMAT MANTUP**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN MANTUP

**SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.**
Penata Tk. I
NIP. 19851010 200602 1 001

**DAFTAR ISI**


| | | Hal. |
|---|---|---|
| KATA PENGANTAR. ……..….. | | i |
| DAFTAR ISI. ……..... | | ii |
| BAB I | PENDAHULUAN. ……..……. | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang. ……..... | 1 |
| | 1.2 Dasar Hukum ……..... | 2 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan …….. | 4 |
| | 1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja……... | 4 |
| BAB II | HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU…….. | 6 |
| | 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD …….…… | 6 |
| | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD…… | 12 |
| | 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Mantup……...…… | 14 |
| | 2.4 Penelaaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……. | 16 |
| BAB III | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 17 |
| | 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi…….. | 17 |
| | 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2022…… | 18 |
| | 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2022…… | 19 |
| BAB IV | PENUTUP……...…….. | 29 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 yang telah berjalan dapat mengetahui beberapa kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target kinerja. Rencana Kerja Perubahan PD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perubahan PD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perubahan berperan penting dalam setiap kinerja suatu PD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah di rancang sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan PD Kecamatan Mantup dilakukan dengan menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Mantup untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perubahan tahun yang telah lalu serta mengacu pada Renstra PD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan perubahan Rencana Kerja tahun berjalan yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang baik Desa maupun Kecamatan.

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perubahan OPD didasarkan atas pertimbangan pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing OPD;
c. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD sebagian besar merupakan pergeseran dana yang berasal dari kegiatan kurang maksimal penyerapannya maka akan dipindahkan ke kegiatan yang masih memerlukan dana sehingga

kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan sampai dengan akhir tahun 2022 serta lebih optimal kemanfaatannya bagi warga masyarakat;

d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana.

## 1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mantup Tahun 2022 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasiifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

**Maksud** Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

**Tujuan** penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mantup Tahun 2022 adalah:

1. Menjadi pedoman bagi PD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun 2022;
2. Penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga lebih optimal bagi masyarakat;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2022;
4. Memastikan bahwa APBD Perubahan tahun 2022 disusun berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2022.

## 1.4. Sistimatika Penyusunan Perubahan Renja

**BAN I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang :

1.2. Landasan Hukum Penyusunan :

1.3. Maksud dan Tujuan :
1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Renja:

**BAB II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2022**

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s.d Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2022
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2022

**BAB IV PENUTUP**

# BAB II
# EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2022

## 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD menjadi salah satu indikator substansif dalam Kebijakan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2022. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian indikator setiap porogram (outcome) dan kegiatan (output) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

Realisasi Capaian indikator yang belum memenuhi target namun bersifat wajib dan merupakan prioritas daerah perlu penyesuaian input anggaran atau penambahan Program / kegiatan namun dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran dan sisa waktu pelaksanaan. Sebaliknya, program/kegiatan yang telah melampaui pencapaian target indikator kinerja dan bukan merupakan program /kegiatan prioritas daerah juga perlu dilakukan penyesuiaan anggaran atau bahkan penghapusan program/kegiatan. Selain penyesuaian anggaran dan penambahan / penghapusan program/kegiatan, berdasarkan evaluasi juga dapat dilakukan penyesuaian target indikator kinerja dengan memperhatikan kondisi daerah.

Berdasatkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan ( tahun 2022 ) oleh PD Kecamatan Mantup menunjukkan bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik. Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mantup yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD tersaji dalam tabel berikut:

## Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2022

**PD : KECAMATAN MANTUP**

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 | | | Target dan Realisasi Kinerja program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022 s/d Triwulan II | | Catatan/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | Target | Realisasi | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Kecamatan** | **89,00** | | **100%** | **100%** | **100%** | **85,00** | **-** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu** | **100%** | | 100% | 100% | **100%** | **100%** | **60%** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | **01** | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 100% | 8 Dokumen | 5 Dokumen | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | **05** | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Evaluasi | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% | 7 Dokumen | 4 Dokumen | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | **06** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% | 4 Laporan | 2 Laporan | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Prosentase Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu** | **100%** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **53%** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | **01** | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 SPJ Gaji | | 14 SPJ Gaji | 14 SPJ Gaji | 100% | 14 SPJ Gaji | 8 SPJ Gaji | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | **05** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | - | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | **07** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 2 Laporan | 1 Laporan | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Prosentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan Baik** | **100%** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** | **02** | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang diadakan | 35 Stel | | 35 Stel | 35 Stel | 100% | 35 Stel | - | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Prosentase Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **82%** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | **01** | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6 Jenis | | 6 Jenis | 6 Jenis | 100% | 6 Jenis | 6 Jenis | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | **04** | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah ATK | 41 Jenis | | 46 Jenis | 46 Jenis | 100% | 41 Jenis | 30 Jenis | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | **05** | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | 5 Jenis | | 7 Jenis | 7 Jenis | 100% | 5 Jenis | 5 Jenis | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | **06** | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 Jenis | | 5 Jenis | 5 Jenis | 100% | 2 Jenis | 2 Jenis | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | **09** | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Makanan dan Minuman rapat yang Tersedia | 8 Jenis | | 5 Jenis | 5 Jenis | 100% | 8 Jenis | 8 Jenis | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan** | **100%** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **30%** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | **06** | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor | 4 Item; 3 jenis | | 6 Item; 5 jenis | 6 Item; 5 jenis | 100% | 4 Item; 3 jenis | 2 Item | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik** | **100%** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | **02** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor | 3 Jenis Jasa | | 4 Jenis Jasa | 4 Jenis Jasa | 100% | 3 Jenis Jasa | 3 Jenis | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | **03** | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Sertvice Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 Jenis Service | | 5 Jenis Service | 5 Jenis Service | 100% | 3 Jenis Service | 2 Jenis | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Pegawai yang diberikan Iuran JKN ASN, Jumlah tenaga administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang dsediakan, Jumlah tenaga kebersihan Kantor | 11 Pegawai, 13 Orang, 1 Orang | | 11 Pegawai, 12 Orang, 1 Orang | 11 Pegawai, 12 Orang, 1 Orang | 100% | 11 Pegawai, 13 Orang, 1 Orang | 11 Pegawai, 13 Orang, 1 Orang | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik** | **100%** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **70%** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara | 6 unit | | 6 unit | 6 unit | 100% | 6 unit | 4 Unit | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 6 unit | | 6 unit | 6 unit | 100% | 6 unit | 6 Unit | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Jumlah Rehab Gedung Kantor | 3 Gedung; 1 Gedung | | 3 Gedung; 1 Gedung | 3 Gedung; 1 Gedung | 100% | 3 Gedung; 1 Gedung | 2 Gedung | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu** | **100%** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan | **15 Jenis** | | **100%** | **100%** | **100%** | **15 Jenis** | **15 Jenis** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 15 Jenis Pelayanan; IKM 89,00 | | 15 Jenis Pelayanan; IKM 80,20 | 15 Jenis Pelayanan; IKM 82,95 | 103,43% | 15 Jenis Pelayanan; 85 Nilai | 15 Jenis Pelayanan | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat** | **100%** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa** | **15 Desa** | | **100%** | **100%** | **100%** | **15 Desa** | **15 Desa** | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 15 Desa | | 15 Desa | 15 Desa | 100% | 15 Desa | 15 Desa | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan** | **100%** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum** | **4 Rapat** | | **4 Rapat** | **4 Rapat** | **100%** | **4 Rapat** | **2 Rapat** | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 05 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penaganan Konflik sosial yang terselesaikan | 15 Desa | | 15 Desa | 15 Desa | 100% | 15 Desa | 15 Desa | |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Desa Naik Kelas** | **53,33%** | | **20,00%** | **20,00%** | **100%** | **26,67%** | **-** | |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **15 Desa** | | **15 Desa** | **15 Desa** | **100%** | **15 Desa** | **15 Desa** | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang mengikuti Pembinaan Pemerintahan Desa | 15 Desa | | 15 Desa | 15 Desa | 100% | 15 Desa | 15 Desa | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi | 15 Desa | | 15 Desa | 15 Desa | 100% | 15 Desa | 15 Desa | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 15 Desa | | 15 Desa | 15 Desa | 100% | 15 Desa | 15 Desa | |

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan tahun berjalan dapat disimpukan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

   Tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan

2. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Untuk mendukung pelaksanaan dari program tersebut, Kecamatan Mantup memiliki 11 Kegiatan dengan 25 Sub Kegiatan yang mana realisasi kinerja dari semua kegiatan tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Tidak ada program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncakanan.

4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan:
   1) Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai target;
   2) Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia; serta
   3) Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

   Target capaian program Renstra tahun 2021 - 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja ( Renja ).

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil:
   1) Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.
   2) Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.
   3) Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD**

PD Kecamatan Mantup yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Mantup dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Mantup dapat dilihat sebagaimana tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan mantup**
**Kabupaten Lamongan**

| No | Indikator Sasaran | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | 83,22 | 83,85 | 84,48 | 81,78 | 82,95 | 83,22 | 83,85 | |
| 2 | Jumlah Desa Mandiri | | | 2 | 3 | 4 | - | - | 2,00 | 3 | |
| 3 | Nilai SAKIP Kecamatan | | | 81,04 | 81,14 | 81,24 | 80,94 | 81,00 | 81,04 | 81,14 | |
| 4 | Jumlah Desa Maju | | | 10 | 10 | 11 | 9 | 13 | 13 | 13 | |
| 5 | IKM Internal Kecamatan | | | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 80,20 | 82,95 | 85,00 | 86,00 | |
| 6 | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 8 | Persentase Konflik yang Tertangani | | | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | |
| 9 | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 10 | Persentase Desa Naik Kelas | | | 26,67% | 33,33% | 40,00% | 20,00% | 26,67% | 26,67% | 33,33% | |

**2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Mantup adalah :**

1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Mantup dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Mantup :
   1) Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Mantup sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Mantup
   2) Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
   3) Usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Mantup belum semuanya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
   4) Perlunya pembinaan kepada penyelenggara kamtibnas dan sosialisasi dengan pihak terkait untuk pengendalian keamanan lingkungan
   5) Pengelolaan Pemerintahan Desa yang belum teradministrasi dengan baik dan APBD Desa yang masih memerlukan penyempurnaan agar secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

   **Tantangan :**
   1) Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras ( *Soft ware – Hard ware*) sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan;
   2) Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;

3) Keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;

**Peluang :**

1) Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
2) Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya;
3) Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan SDM terkait dengan penggunaan alat dan prosedur pelayanan yang baik untuk kepuasan masyarakat;
4) Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan;

4. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

1) Reformasi Birokrasi atau penataan Sumber Daya Manusia
   - Mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia yang ada;
   - Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
   - Mendorong untuk bekerja yang profesional dengan memberikan penghargaan bagi bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan.
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana
   - Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada;
   - Penambahan perangkat dan peralatan yang canggih untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat pelayanan melalui pengadaan rutin tahunan;
   - Perbaikan fasilitas ruang pelayanan serta menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan.
3) Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan
   - Sosialisasi dan memberikan informasi kepada msyarakat setiap ada kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di Kecamatan Mantup;

- Memberikan informasi dan penekanan kepada Kepala Desa melalui konperensi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan;
- Membuat inovasi pelayanan yang dapat mempermudah dan mempercepat proses permohonan masyarakat Kecamatan Mantup.

## 2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. PD Kecamatan Mantup sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke PD terkait.

**Tabel 2.3**
**Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Lamongan**

**PD : Kecamatan Mantup**

| No. | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NIHIL

# BAB III
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Tahun 2022 yang selaras dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kebijakan Nasional | |
| | Tema Pembangunan:<br>Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural | Prioritas 7:<br>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik |
| 2 | Kebijakan Provinsi | |
| | Tema Pembangunan:<br>Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro | Prioritas 7:<br>Peningkatan Ketentraman,Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur |
| 3 | Kebijakan Kabupaten | |
| | Tema Pembangunan:<br>Pemantapan Sosial Ekonomi | Prioritas Kabupaten:<br>Peningkatan Ketentraman, Kemanan, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Kabupaten Lamongan |

Mengacu pada arah kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan kebijakan daerah, maka arah kebijakan perencanaan program dan kegiatan pada PD Kecamatan Mantup diseleraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mantup Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026.

## 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2022

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah **"TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN".**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi Ke-5 **"Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi"** Fokus misi ke lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri. Sebagai upaya untuk mencapai Misi V, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.**

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Kecamatan Mantup mengacu pada Misi 5 RPJMD Kecamatan Mantup mengambil rencana 2 (Dua) sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan sebagai tujuan, yaitu :

**1.** : **Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif**

Indikator : Nilai IKM

**2.** : **Meningkatkan Kemandirian Desa**

Indikator : Prosentase Peningkatan Desa Mandiri

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan sasaran. Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan menengah ditetapkan sebagai berikut :

**1. : Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah**

Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan

**2. : Meningkatnya Pemberdayaan Desa**

Indikator : Jumlah Desa Maju

## 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2022

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan rumusan program dan kegiatan antara lain adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan Fisik, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas dimasing-masing Desa se Kecamatan Mantup.

Berdasarkan APBD Tahun 2022, Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kecamatan Mantup melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan, dan 25 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.166.516.165,00. Sementara pada Perubahan Renja PD (P-RKPD) Kecamatan Mantup Tahun 2022 ini akan dilaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan, dengan 26 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.176.516.165,00. Sehingga terdapat penambahan 1 sub kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00.

Penambahan sub kegiatan bersifat mendesak untuk dilaksanakan pada tahun berjalan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat terdapat pada program **Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** Kegiatan **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan** sub kegiatan **yaitu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.** Berikut Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan PD Kecamatan Mantup pada Perubahan Renja Tahun 2022:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :**
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - Peyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :**

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
   - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan :**

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**4. Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :**

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

5. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :**
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
      - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Tabel 3.1**
**Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2022**

| Kode Rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | Lokasi Kegiatan | | Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah / Berkurang | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | | | | (4) | | (5) | | | (6) |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Kecamatan** | **85,00** | **Nilai IKM Kecamatan** | **85,00** | | | **Rp 2.040.855.365** | **Rp 2.085.985.165** | **Rp 45.129.800** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu** | **100%** | **Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu** | **100%** | | | **Rp 36.193.300** | **Rp 29.373.300** | **Rp (6.820.000)** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | **01** | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras | 8 Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras | 8 Dokumen | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 12.734.700 | Rp 10.503.500 | Rp (2.231.200) | APBD |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | **05** | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Evaluasi | 7 Dokumen | Jumlah Dokumen Evaluasi | 7 Dokumen | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 10.845.000 | Rp 8.395.400 | Rp (2.449.600) | APBD |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | **06** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun | 4 Laporan | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun | 4 Laporan | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 12.613.600 | Rp 10.474.400 | Rp (2.139.200) | APBD |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu** | **100%** | **Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu** | **100%** | | | **Rp 1.376.373.165** | **Rp 1.380.864.165** | **Rp 4.491.000** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | **01** | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 SPJ Gaji | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 SPJ Gaji | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 1.351.894.265 | Rp 1.360.394.265 | Rp 8.500.000 | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | **05** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Laporan | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Laporan | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 13.139.000 | Rp 9.130.000 | Rp (4.009.000) | APBD |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | **07** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun | 2 Laporan | Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun | 2 Laporan | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 11.339.900 | Rp 11.339.900 | Rp - | APBD |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Prosentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan Baik** | **100%** | **Prosentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan Baik** | **100%** | | | **Rp 20.000.000** | **Rp 20.000.000** | **Rp -** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** | **02** | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang diadakan | 35 Stel | Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang diadakan | 35 Stel | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp - | APBD |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu** | **100%** | **Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu** | **100%** | | | **Rp 81.403.000** | **Rp 81.403.000** | **Rp -** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | **01** | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6 Jenis | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6 Jenis | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp - | APBD |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | **04** | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah ATK | 41 Jenis | Jumlah ATK | 41 Jenis | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 23.884.000 | Rp 23.884.000 | Rp - | APBD |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | **05** | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | 5 Jenis | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | 5 Jenis | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 28.921.300 | Rp 28.921.300 | Rp - | APBD |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | **06** | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 Jenis | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 Jenis | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp - | APBD |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | **09** | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Makanan dan Minuman rapat yang Tersedia | 8 Jenis | Jumlah Makanan dan Minuman rapat yang Tersedia | 8 Jenis | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 20.597.700 | Rp 20.597.700 | Rp - | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan** | **100%** | **Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan** | **100%** | | | **Rp 30.169.900** | **Rp 30.169.900** | **Rp -** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor | 6 Item; 5 jenis | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor | 4 Item; 3 jenis | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 30.169.900 | Rp 30.169.900 | Rp - | APBD |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik** | **100%** | **Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik** | **100%** | | | **Rp 363.041.000** | **Rp 363.041.000** | **Rp -** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor | 3 Jenis Jasa | Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor | 3 Jenis Jasa | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 37.269.000 | Rp 37.269.000 | Rp - | APBD |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Sertvice Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 Jenis Service | Jumlah Jasa Sertvice Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 Jenis Service | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 8.490.000 | Rp 8.490.000 | Rp - | APBD |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Pegawai yang diberikan Iuran JKN ASN, Jumlah tenaga administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang dsediakan, Jumlah tenaga kebersihan Kantor | 11 Pegawai, 13 Orang, 1 Orang | Jumlah Pegawai yang diberikan Iuran JKN ASN, Jumlah tenaga administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang dsediakan, Jumlah tenaga kebersihan Kantor | 11 Pegawai, 13 Orang, 1 Orang | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 317.282.000 | Rp 317.282.000 | Rp - | APBD |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah** | **Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik** | **100%** | **Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik** | **100%** | | | **Rp 133.675.000** | **Rp 181.133.800** | **Rp 47.458.800** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Daerah** | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | **01** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara | 6 unit | Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara | 6 unit | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp - | APBD |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | **02** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 6 unit | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 6 unit | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 29.992.500 | Rp 29.992.500 | Rp - | APBD |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | **10** | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Jumlah Rehab Gedung Kantor | 3 Gedung; 1 Gedung | Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Jumlah Rehab Gedung Kantor | 3 Gedung; 1 Gedung | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 101.682.500 | Rp 149.141.300 | Rp 47.458.800 | APBD |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu** | **100%** | **Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu** | **100%** | | | **Rp 21.322.000** | **Rp 10.227.200** | **Rp (11.094.800)** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan** | **15 Jenis** | **Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan** | **15 Jenis** | | | **Rp 21.322.000** | **Rp 10.227.200** | **Rp (11.094.800)** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | **03** | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 15 Jenis Pelayanan ; 85 Nilai | Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 15 Jenis Pelayanan ; 85 Nilai | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 21.322.000 | Rp 10.227.200 | Rp (11.094.800) | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat** | **100%** | **Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat** | **100%** | | | **Rp 53.478.000** | **Rp 38.352.500** | **Rp (15.125.500 )** | |
| **7** | **01** | **03** | **2, 01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa** | **15 Desa** | **Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa** | **15 Desa** | | | **Rp 53.478.000** | **Rp 38.352.500** | **Rp (15.125.500 )** | |
| **7** | **01** | **03** | **2, 01** | **03** | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Jumlah Desa yang Mengikuti Koordina/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 15 Desa | Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Jumlah Desa yang Mengikuti Koordina/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 15 Desa | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 53.478.000 | Rp 28.352.500 | Rp (25.125.500 ) | APBD |
| **7** | **01** | **03** | **2. 01** | **03** | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | - | Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan Tim Penggerak PKK | 15 Desa | - | Kec. Mantup | Rp - | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 | APBD |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan** | **100%** | **Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan** | **100%** | | | **Rp 13.206.800** | **Rp 9.196.000** | **Rp (4.010.800)** | |
| **7** | **01** | **05** | **2, 01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum** | **4 Rapat** | **Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum** | **4 Rapat** | | | **Rp 13.206.800** | **Rp 9.196.000** | **Rp (4.010.800)** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **05** | **2,01** | **05** | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penaganan Konflik sosial yang terselesaikan | 15 Desa | Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penaganan Konflik sosial yang terselesaikan | 15 Desa | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 13.206.800 | Rp 9.196.000 | Rp (4.010.800) | APBD |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Desa Naik Kelas** | **26,67%** | **Persentase Desa Naik Kelas** | **26,67%** | | | **Rp 37.654.000** | **Rp 32.755.300** | **Rp (4.898.700)** | |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **15 Desa** | **Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **15 Desa** | | | **Rp 37.654.000** | **Rp 32.755.300** | **Rp (4.898.700)** | |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | **02** | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang mengikuti Pembinaan Pemerintahan Desa | 15 Desa | Jumlah Desa yang mengikuti Pembinaan Pemerintahan Desa | 15 Desa | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 12.737.000 | Rp 11.789.500 | Rp (947.500) | APBD |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | **03** | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi | 15 Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi | 15 Desa | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 13.300.800 | Rp 12.423.500 | Rp (877.300) | APBD |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | **11** | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 15 Desa | Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 15 Desa | Kec. Mantup | Kec. Mantup | Rp 11.616.200 | Rp 8.542.300 | Rp (3.073.900) | APBD |
| **J u m l a h** | | | | | | | | | | | | **Rp 2.166.516.165** | **Rp 2.176.516.165** | **Rp 10.000.000** | |

# BAB IV
# PENUTUP

Renja Perubahan PD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Fungsi strategis perubahan rencana kerja ini dapat juga sebagai tolok ukur keberhasilan perencanaan baik dari segi target, perencanaan program dan kegiatan, maupun dari segi perencanaan anggaran.

Selanjutnya Renja Perubahan Kecamatan Mantup Tahun 2022 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan Kecamatan Mantup dalam kerangka penyusunan RAPBD Perubahan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Mantup Tahun Anggaran 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparatur Kecamatan Mantup. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal

Mantup, 5 Agustus 2022

**CAMAT MANTUP**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN MANTUP

**SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.**
Penata Tk. I
NIP.19851010 200602 1 001